



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



**UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
TENTANG**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM**

**Nomor 83 /PK/2019  
Nomor 25/UM16-1/KL/2019**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di **Jakarta** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.**, Rektor Universitas Nusa Cendana, berkedudukan di Jalan Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Cendana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum, serta akses masyarakat terhadap keadilan dan lembaga peradilan, **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conference* Mahkamah Konstitusi yang ditempatkan di Universitas Nusa Cendana;
- d. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum;
- c. penyelenggaraan persidangan jarak jauh; dan
- d. diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

**Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan pemahaman hak konstitusional warga negara;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
  - c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum  
**Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengembangan materi hukum dan konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
  - b. Penelitian, pengkajian, seminar dan kuliah umum tentang hukum dan konstitusi;
  - c. Pengembangan Jurnal Konstitusi; dan
  - d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga**  
Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh  
**Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan persidangan jarak jauh melalui penggunaan teknologi *video conference*.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan pelaksanaan persidangan jarak jauh melalui penggunaan teknologi *video conference* milik **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Keempat**  
Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi  
**Pasal 6**

**PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

**BAB IV**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

**BAB VI**  
**TINDAK LANJUT**  
**Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu**  
**Adendum**  
**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua**  
**Masa Berlaku**  
**Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1312/HP.00.03/05/2019  
Hal : Tindak Lanjut Penandatanganan Nota Kesepahaman

09 Mei 2019

**Yth. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum**

1. Universitas Cendrawasih
2. Universitas Lambung Mangkurat
3. Universitas Diponegoro
4. Universitas Gajahmada
5. Universitas Lampung
6. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Universitas Nusa Cendana
8. Universitas Malikussaleh
9. Universitas Negeri Gorontalo

Dengan hormat, menindaklanjuti kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi, telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi pada 1-2 Mei 2019 di Jakarta. Berkenaan dengan ketidakhadiran Bapak/Ibu pada acara dimaksud, bersama ini kami sampaikan Draft Naskah Nota Kesepahaman Asli untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon perkenan menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Kami kirimkan Naskah Nota Kesepahaman Asli dimaksud kepada Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum
2. Naskah Nota Kesepahaman Asli dimaksud mohon untuk ditandatangani oleh Rektor dan dibubuhi stempel universitas.
3. Mengirimkan kembali naskah yang sudah di tanda tangani Rektor dan distempel universitas tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk di Tanda Tangani oleh YM. Bapak Ketua MK
4. Mohon kiranya Pengiriman Naskah MOU Asli dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
5. Alamat pengiriman ke MK adalah sbb:

**Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi,  
Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 3,  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110**

6. Terhadap MOU yang telah di Tanda Tangani oleh YM. Bapak Ketua MK, kami akan upload di website MK serta kami kirimkan kembali 1 asli kepada Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Biro Humas dan Protokol,

**Heru Setiawan**

Tembusan: Yth. Sekretaris Jenderal MKRI.



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol  
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1 001  
Digital Signature-mk1747086803

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Perbedaan Penafsiran**  
**Pasal 12**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.**

**MENGETAHUI,**  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**



**Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**